

KEKERASAN DAN KRIMINALITAS DI KOTA SEMARANG: ANTARA NEGARA KOLONIAL DAN OTORITAS LOKAL

VIOLENCE AND CRIME IN SEMARANG CITY: BETWEEN THE COLONIAL STATE AND LOCAL AUTHORITY

Putri Agus Wijayati

Jurusan Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang
Gedung C.2 Lt.1. Kampus Unnes Sekaran Gunugpati Semarang 50229
Email: putrikediri1962@gmail.com

Naskah diterima tanggal 27 Agustus 2019, Naskah direvisi tanggal 3 September 2019, Naskah disetujui tanggal 2 Oktober 2019

Abstrak

Memasuki dekade pertama awal abad ke-20, Semarang sebagai unit historis mengalami modernisasi yang didukung oleh terbangunnya infrastruktur sebagai kota kolonial, yang mengidealkan keteraturan. Kajian sejarah ini mencoba menghadirkan kehidupan keseharian warga kota dan penguasa kota yang diwarnai oleh keragaman faktual, mulai dari keteraturan hingga ketidakteraturan sosial, namun lebih difokuskan pada kondisi-kondisi ketidakteraturan, ketidakamanan, dan beragam persoalan sosial lainnya yang pernah terjadi di Kota Semarang pada empat dekade akhir era kolonial. Sebagai realitas masa lalu, berbagai permasalahan sosial yang berlangsung di Kota Semarang dikonstruksi berdasarkan sumber primer dan sekunder. Konstruksi historis ini dipahami melalui konsep kekerasan dan kriminalitas. Penguasa kota, yang dalam hal ini adalah gemeente merupakan representasi kuasa dari negara kolonial ingin membuat segala sesuatunya menjadi aman dan teratur, sehingga hukum dan aturan yang diproduksi oleh gemeente didasarkan pada cara pandang kolonial. Dalam konteks implementasi hukum itulah, kemudian atas nama keteraturan maka negara kolonial mengambil alih otoritas yang sebelumnya berada di tangan penguasa lokal, yang mengakibatkan ekslusivitas penguasa lokal. Pada saat yang sama, penguasa lokal ingin mempertahankan eksistensi diri di ruang kota, sehingga yang terjadi adalah sebagian dari mereka terkonversi ke dalam informal services atau illegal agency di perkotaan. Kajian ini menyimpulkan bahwa ketidakteraturan sosial yang berlangsung di ruang kota membuktikan ketidakmampuan negara kolonial dalam mengatur warga kota.

kata kunci: kekerasan, kriminalitas, negara kolonial, otoritas lokal, kehidupan keseharian warga kota.

Abstract

Entering the first decade of the early 20th century, Semarang as a historical unit experienced modernization which was supported by the construction of infrastructure as a colonial city, which idealized order. This historical study tries to present the daily lives of citizen and city rulers colored by factual diversity, ranging from regularity to social irregularities, but more focused on conditions of disorder, insecurity, and various other social problems that have occurred in the city of Semarang in four decades end of the colonial era. As a past reality, various social problems that took place in Semarang City were reconstructed based on primary and secondary sources. This historical construction is understood by through the concepts of violence and crime. The ruler of the city, which in this case is gemeente, is a power representation of the colonial state want to make things are safe and orderly, so that the laws and regulations are produced by gemeente which based on the perspective of colonialism. In the context of implementing the law, then in the name of order the colonial state took over the authority previously in the hands of the local authorities, which resulted in the exclusivity of local authorities. At the same time, local authorities want to maintain their existence in the city space, so what happens is that some of them are converted into informal services and illegal agencies in cities. This study concluded that the social irregularities that took place in the city space proved that the inability of the colonial state to regulate the citizens of the city.

Keywords: violence, crime, colonial state, local authorities, the daily lives of citizen.

PENDAHULUAN

Pada penghujung tahun 2018 hingga Januari 2019, sebagian masyarakat Kota Semarang dibuat resah oleh tindakan kejahatan berupa pembakaran kendaraan, baik mobil maupun sepeda motor. Hingga awal tahun 2019, tercatat 22 kasus pembakaran yang dilakukan oleh sekelompok orang yang sampai detik ini motifnya tidak teridentifikasi. Beberapa bukti menunjukkan bahwa pelaku kejahatan menjalankan aksi dengan cara melempar botol berisi bahan bakar yang diberi sumbu yang terbuat dari tali atau kain. Segera setelah botol dilemparkan, maka mobil atau sepeda motor yang disasar menjadi mudah terbakar. Seperti yang diwartakan surat kabar nasional bahwa, aksi kejahatan itu tersebar di kampung-kampung dan perumahan yang dilakukan secara acak, berlangsung di ruang privat seperti halaman dan garasi rumah (*Kompas*, 1/2/2019).

Menanggapi tindak kejahatan menjelang dekade kedua abad ke-21 tersebut, Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo menyatakan bahwa dalam kehidupan warga kota tidak ditemukan adanya konflik dan tidak pula dijumpai persoalan krusial yang dapat dijadikan alasan sebagai pemicu aksi pembakaran. Hal itu menggambarkan bahwa pelaku bukan warga atau penduduk kota, artinya peristiwa itu menunjukkan keterlibatan aktor eksternal yang berasal dari luar Semarang. Asumsi yang bisa dibangun berdasarkan bukti yang ada bahwa tindakan kejahatan itu ada hubungannya dengan menjelang pemilihan presiden 17 April 2019 yang bertujuan membuat keresahan, kekhawatiran, dan ketegangan sosial dalam kehidupan masyarakat sehari-hari di kota. Kondisi psikologis itu diharapkan akan menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap penyelenggara pemilu, pemerintah atau negara dalam konteks yang lebih luas (*Kompas*, 24/5/2019).

Namun ternyata tidak cukup berhasil menjadikan Semarang sebagai laboratorium untuk mengacaukan penyelenggaraan pemilu 2019. Realitas yang terjadi kemudian malah sebaliknya, Semarang menduduki level kedua

setelah Surabaya dalam menyumbangkan perolehan suara calon presiden petahana.

Dua puluh satu tahun silam, Mei 1998 Semarang sebenarnya telah membuktikan sebagai kota yang mampu menjaga keamanan dalam batas-batas tertentu, sehingga terhindar dari kerusuhan sosial, ketika Kota Solo mengalami kerusuhan yang sangat ekstrem dan brutal (Steedly, 1999:445). Solo sebagai jantung budaya Jawa memperlihatkan ketidakmampuannya menghindar dari kekerasan dan kriminalitas, sementara Semarang pada saat yang bersamaan bisa dikategorikan sebagai kota dengan tensi ketegangan yang rendah.

Jika menggunakan pendekatan genealogis, hal serupa dialami Semarang ketika terjadi kerusuhan rasial pada November 1980, terutama di Pasar Johar yang merupakan tempat bertemunya beragam etnis yaitu Jawa, Tionghoa, Arab, Koja, Sunda, dan etnis lainnya. Kunto, seorang pedagang keturunan Tionghoa mengisahkan pengalamannya yang merasa aman dan terlindungi menjalankan aktivitas ekonominya di Pasar Johar (*Suara Merdeka*, 13/12/1980), sementara kekerasan anti Tionghoa di kota yang lain bergolak sangat ekstrim, brutal, dan anarkhis.

Ketika memperbincangkan kekerasan dan kriminalitas dalam kehidupan masyarakat kolonial abad ke-19, maka yang terkonstruksi dalam historiografi Indonesia lebih didominasi oleh kejadian yang berlangsung di ruang geografis pedesaan (Kartodirdjo, 1984; Suhartono, 1991; Suhartono, 1995; Wijayati, 2001). Namun memasuki awal abad ke-20, sebagai pengalaman historis beberapa persoalan sosio-psikologis seperti keresahan, ketidakamanan, ketakutan yang disebabkan aksi kriminalitas mewujud dalam tindakan perampokan, pembegal, perampasan, pencurian, maupun penipuan mulai menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari masyarakat perkotaan.

Meminjam kerangka berpikir Bambang Purwanto dalam mengkonstruksi pengalaman hidup sehari-hari orang kebanyakan atau masyarakat kecil di perkotaan (2008: 245-276; 2013: 37), maka

tulisan ini akan dibangun berdasarkan sumber primer yang berhasil dikumpulkan melalui surat kabar sezaman.

Tulisan ini bukan bertujuan membandingkan tingkat kekerasan dan kriminalitas antara Semarang dengan kota-kota lainnya, dan juga tidak bermaksud mengingkari bahwa kekerasan dan kriminalitas merupakan bagian dari persoalan perkotaan masyarakat Semarang. Dalam makalah ini akan lebih difokuskan pada upaya mengkonstruksi realitas historis tentang kekerasan dan kriminalitas yang berlangsung selama empat dekade kolonial akhir, yang lebih menekankan pada permasalahan sehari-hari kehidupan sosial masyarakatnya (Purwanto, 2005).

Terwujudnya tulisan ini, diharapkan mampu menghadirkan aktor sejarah yang dimainkan oleh masyarakat dalam setiap peristiwa historis dan menghadirkan kelompok yang terabaikan dalam sejarah (Purwanto, 2006:27; Purwanto, 2017), yang terlepas dari kepentingan politis. Selain itu, tulisan ini berupaya mengikuti cara berpikir dekonstruktif Bambang Purwanto (2005: 213) yang memproduksi keragaman realitas masa lalu. Masa lalu masyarakat kota dalam tindakan kriminal yang cenderung dilakukan oleh sekelompok orang untuk bisa bertahan hidup di tengah proses kekotaan. Kondisi-kondisi modernitas menjadi relevan untuk memahami bentuk dan jenis tindakan kriminal dan kekerasan yang terjadi (Gidden, 2005: 9, 13, 22).

Tulisan ini membahas bentuk, kecenderungan, dan jenis-jenis kriminalitas yang terjadi di ruang kota, baik ruang publik maupun ruang privat. Dari catatan sumber yang tersedia, ditemukan beragam bentuk dan jenis kriminal, baik yang mengandung unsur kekerasan maupun dilakukan secara manipulatif.

Menuju Kota Modern

Memasuki awal abad ke-19, sebuah rezim kolonial mulai memperoleh legalitasnya sebagai negara kolonial di tanah ibu pertiwi yang kemudian bernama Indonesia (Elson,

2002: 143-149; Vickers, 2011; Van Zanden dan Marks, 2012: 58-92). Perubahan sistem pemerintahan selama dua dekade abad ke-19, memengaruhi terbentuknya keresidenan Semarang (Day, 1905:162-163; Bastin, 1957; Suryo dan Margana (ed), 2009: 123). Menginjak dekade ketiga, negara kolonial yang dilaksanakan dalam bentuk *indirect rule* benar-benar mengontrol penduduk bumiputra untuk memaksimalkan tanaman komoditas ekspor melalui perantaraan penguasa lokal, yang berlangsung hingga perempatan ketiga abad ke-19 (Suryo, 1989; Suroyo, 2002: 115-117; Dick, 2002:34; Boomgaard, 2004; Pratiwo, 2005: 119-120).

Sebagai unit politis, Semarang ditempatkan di bawah pengawasan otoritas asisten residen yang disebut *afdeeling* Semarang (Malo & Nas, 1991:500). Sementara kontrol penguasa bumiputra atas masyarakatnya masih berlangsung, sehingga Semarang menjadi ibukota dua pusat pemerintahan antara kabupaten dan *afdeeling* dalam bingkai kekuasaan negara kolonial sentralistik di bawah kuasa Jakarta (Suryo, 1989:7). Pejabat bumiputra atau penguasa lokal diwujudkan dalam jabatan bupati atau adipati, patih, wedana, asisten wedana, lurah hingga kepala kampung (Malo & Nas, 1991).

Sebagai sebuah proses yang berkelanjutan, awal abad ke-20 terjadi transformasi administasi pemerintahan, yang dimotivasi oleh penerapan Undang-undang Desentralisasi tahun 1903 (*Staatsblad van Nederlandsch Indië* 1903 №. 329; Purwanto, 2004). Semarang yang dua abad sebelumnya masih dicirikan sebagai kota yang berada di bawah kewenangan adipati, maka awal abad ke-20 telah mengalami perubahan sistem administrasi pemerintahan secara elementer menjadi *gemeente* yang mempunyai kewenangan mengelola segala sesuatu di kota yang bersangkutan (*Staatsblad van Nederlandsch Indië* 1906 №. 120; Suryo, 1989:124; Brommer (ed.), 1995: 21; Kuncoro, 1995:6).

Bulan keempat tahun 1906 terbentuk dewan kota (*gemeenteraad*) yang terdiri atas dua puluh tiga anggota dengan komposisi lima belas orang Eropa, lima orang Bumiputra, tiga

orang Cina dan Timur Asing lainnya dengan Asisten Residen L.R. Priester sebagai ketua dewan (*Selompret Melajoe*/30/1/1906). Komposisi anggota dewan tersebut, secara sangat jelas menggambarkan begitu dominannya otoritas kolonial atas kehidupan masyarakat kota. Sementara kehadiran sistem administrasi *gemeente* secara langsung telah menggeser otoritas lokal yang sebelumnya melekat pada penguasa bumiputra. Tidak mengherankan jika kemudian beragam tindakan kriminal yang menjadi bagian kehidupan sosial masyarakat Semarang, tidak bisa dilepaskan dari keterlibatan agen-agen ilegal, yang pada masa-masa sebelumnya memiliki wewenang dalam mengakses sumber ekonomi yang ada di kota.

Argumen Nas dan Theuns yang menyatakan bahwa meskipun awal abad ke-20 perekonomian Semarang lesu, *gemeente* melakukan kontrol untuk meringankan kemiskinan, perbaikan kampung-kampung kumuh, dan kesehatan masyarakat kota yang merupakan problem perkotaan (2005:73-75; Wijono, 2013: 42-47). Problem perkotaan menjadi masalah tersendiri bagi penguasa kota. Kekuasaan kolonial melalui *gemeente* membawa standard barat ke kota ini, antara lain ingin membuat kota kelihatan teratur, tertib, dan makmur; serta membangun sebuah ideologi keamanan dan kestabilan sosial. Ideologi pemerintah kota kolonial hendak diwujudkan dalam bentuk kehidupan masyarakat kota pada stabilitas semua elemen kehidupan.

Sementara itu, perubahan Semarang sebagai kota kolonial modern telah menjadi daya tarik bagi penduduk dari luar kota untuk turut menikmati kemajuan yang diraih Semarang. Jika di Surabaya, ruang kota semakin kompleks dengan adanya perebutan ruang oleh rakyat miskin kota (Basundoro, 2012), maka dalam konteks Semarang terlihat semakin tumbuh suburnya rumah liar di area pusat kota. Terbangunnya beragam fasilitas publik rupanya turut andil dalam beragamnya bentuk-bentuk dari tindakan kriminal. Untuk itulah, pemerintah kota tidak sebatas membentuk aparat keamanan, namun pembangunan infrastruktur politik berupa pos-pos polisi, bangunan penjara, dan kantor

pengadilan menjadi penanda dari kontrol kuasa kolonial atas ketidakteraturan sosial yang berlangsung di ruang kota. Beberapa simbol ketakutan negara, sebenarnya bukan sesuatu yang baru hadir di awal abad ke-20, karena kekuasaan tradisional Jawa jauh sebelum orang Eropa datang, simbol-simbol penjaga keamanan telah dibentuk. Transformasi yang dialami Semarang dari kota tradisional ke kota modern, bukan semata-mata ditandai oleh perubahan fisik kota (Wiryomartono, 1995; Nas & Boender, 2002: Handinoto, 2015), melainkan yang lebih dirasakan oleh pejabat bumiputra atau penguasa lokal adalah terfragmentasinya otoritas atas sumber ekonomi kota.

Kekerasan dan Kriminalitas Perkotaan

Kejahatan atau kriminal merupakan persoalan bagi negara dan komunitas perkotaan yang mengidealkan keteraturan dan ketenangan, namun sebaliknya kriminalitas juga diproduksi, didistribusi, dan direpresentasi oleh negara (Steedly, 1999) untuk menjamin berlangsungnya kekuasaan. Terlepas dari persoalan tersebut, meminjam klasifikasi yang digunakan Hunter (1985: 236) dalam mengelompokkan jenis tatanan sosial di perkotaan, yaitu ruang privat dan ruang publik. Dalam konteks kehidupan sosial warga kota di Semarang, dua jenis tatanan sosial itu akan dipakai untuk memahami komunitas perkotaan sepanjang empat dekade akhir masa kolonial.

Pertama, ruang privat mewujud dalam bentuk pemukiman atau tempat tinggal penduduk kota yang disebut kampung kota (Cobban, 1988) maupun deretan rumah mewah sepanjang jalan besar yang dihuni oleh kelompok pejabat kolonial. Kedua, ruang publik yang direpresentasikan dalam bentuk kelengkapan fisik atau infrastruktur kota misalnya, jalan-jalan, alun-alun, pasar-pasar, persimpangan jalan, dan tempat pemberhentian angkutan umum.

Tempat-tempat umum tersebut menjadi milik semua orang (Hunter, 1985: 237), baik ditujukan untuk penduduk kota maupun yang berasal dari luar perkotaan. Infrastruktur kota modern Semarang di awal abad ke-20, yang ditandai oleh keberadaan infrastruktur politik, infrastruktur budaya, dan

infrastruktur ekonomi. Ketiga jenis infrastruktur kota tersebut hampir terpusat di area yang disebut sebagai pusat kota, yaitu di sekitar pusat pemerintahan kolonial yang saat ini lebih dikenal dengan sebutan Kota Lama. Sementara itu, kelengkapan fisik yang berada di sekitar pusat pemerintahan bumiputra, lebih pada infrastruktur ekonomi berupa pasar. Pasar merupakan salah satu ruang publik yang mempertemukan berbagai elemen masyarakat dengan beragam kepentingan untuk terlibat di dalamnya (Evers & Korff, 2002: 23; Wijayati, 2019).

Ruang publik perkotaan yang mempunyai tingkat kepadatan aktivitas warga kota tertinggi adalah pasar. Pasar-pasar di kota menjadi ruang publik dengan frekuensi pertemuan tertinggi antara orang-orang dengan latar belakang sosial yang berbeda. Dalam beberapa sumber yang berhasil ditemukan membuktikan bahwa sepanjang periode tulisan ini dikonstruksi, menunjukkan tingkat kriminalitas cenderung terkonsentrasi di ruang pasar, sekitar pasar, jalan-jalan yang dilalui oleh orang-orang yang akan pergi atau pulang dari pasar.

Berdasarkan fakta yang terkumpul, bukan berarti menunjukkan secara akurat realitas masa lalu tentang sejarah kriminal dan kekerasan. Konstruksi atas realitas historis dalam tulisan ini, hanya sebatas pada kejadian-kejadian yang tercatat di surat kabar sezaman, dilaporkan atau tertangkap oleh opas polisi. Tidak mustahil, realitas kejahatan yang terjadi bisa lebih besar intensitasnya daripada yang dikonstruksi dalam tulisan ini.

Sejarah kriminalitas dan kekerasan di Semarang dapat dikelompokkan ke dalam beberapa tipe, namun sebagian besar lebih didominasi oleh motif ekonomi, yaitu kejahatan terhadap harta benda. Dalam konteks kejahatan harta benda, terdapat tipe yang disertai kekerasan dan tanpa kekerasan, sebagaimana yang dikonseptualisasikan Gilbert dan Gugler (1996: 173). Beberapa aksi kriminal yang dikategorikan menipu, mencuri, mencopet, mengutil menjadi bagian yang dialami oleh para korban ketika berada di ruang publik. Sementara menjambret, merampas, membegal, dan menodong

merupakan aksi kriminal terhadap harta benda yang disertai elemen kekerasan.

Dalam laporan berbagai surat kabar sezaman seperti *Warna Warta*, *Dagblad Asia Semarang*, *Pasar Saptoe*, *De Sumatra Post*, *Poesaka*, *Economy*, dan *Soerabaijasch Handelsblad* dapat diidentifikasi aksi kriminal secara kuantitas enam puluh kasus. Terdiri dari dua puluh kasus aksi pencurian yang tercatat dalam laporan jurnalis beragam surat kabar (*Selopret Melajoe*: “Tjoerian”, 22/6/1907; “Gemeenteraad di Semarang”, 30/1/1906; “Sarang Kadet”, 7/3/1908; “Soeka Tetapi Tjoema Sebentar”, 3/12/1907; “Kadet”, 18/8/1908; “Pentjoeri”, 18/8/1908; “Makin Gagah Maling dan Kadet”, 12/9/1911; “Tjerdik”, 26/11/1907; “Tjoerian Kain”, 20/4/1907; “Kadet”, 17/10/1908; *Djawa Tengah*: Maling Oeloeng”, 11/4/1930; “Pentjoerian di Pasar Djohar Semarang”, 3/11/1937; dan *Soeara Semarang*: “Perkara Pentjoerian di Pasar Djohar”, 2/2/1939; “Itoe Perkara Pentjoerian di Pasar Djohar”, 19/1/1939; “Pentjoerian di Pasar Djohar”, 20/1/1939; “Perkara Pentjoerian di Pasar Djohar”, 14/2/1939; “Itoe Pentjoerian di Pasar Djohar”, 14/3/1939; “Pentjoerian Dalem Pasar Djohar”, 24/9/1940; “Pentjoeri Ketjil Ditangkep”, 28/10/1940; “Doea Pentjoerian Dalem Pasar Djohar”, 23/7/1941).

Tindak kriminal yang dilakukan dalam bentuk penipuan tercatat dalam koran *Selopret Melajoe* sejumlah empat kasus, yaitu “Membawa barang dengan grobag”, 26/11/1907; “Kadet”, 5/3/1908.; “Keroegian”, 3/12/1907; “Semarang dan sekiternya: Djadi korban penipoe”, dan Statu kasus penipuan diwartakan koran *Djawa Tengah* termuat tanggal 11 April 1930. Sementara aksi pengutilan yang tertangkap dan tercatat sebanyak 6 kejadian, yaitu: “Koetil”. *Selopret Melajoe*, 11/4/1908; “Haroes Didjaga Benar”, *Selopret Melajoe*, 15/10/1908; “Kadet”, *Selopret Melajoe*, 29/1/1910; “Diketjoeboeng?”, *Selopret Melajoe*, 10/11/1910; “Koetil”, *Selopret Melajoe*, 1/9/1911; “Sial Dangkal”, *Warna Warta*, 27/7/1916. Jika pada aksi pencurian, pelaku kriminal menjalankan kegiatannya pada malam hari, maka untuk kegiatan

kejahatan dengan mengutuk dan menipu lebih didominasi dilakukan pada siang hari. Peta kejahatan yang disebutkan sebelumnya di lingkungan pasar ditandai dengan konsentrasi tinggi kelompok kelas sosial yang kurang beruntung, tidak mempunyai tempat tinggal sehingga pinggir jalan dan pasar-pasar menjadi tempat untuk beristirahat. Sangat logis sekali jika dapat diduga bahwa pertemuan-pertemuan dalam kondisi seperti itu memegang kunci untuk memahami kondisi sosial dan ekonomi yang menumbuhkan kejahatan.

Sebagai ruang publik, pusat-pusat keramaian di pasar menjadi tempat yang bebas bagi siapa saja yang mempunyai kesempatan menjalankan aksinya. Aksi kriminalitas disertai kekerasan mewujud dalam bentuk pembegalan, sekalipun bisa dikatakan dengan intensitas yang rendah, yaitu sebanyak lima kasus yang terekam di surat kabar. Hal itu tampak dalam beberapa judul berita antara lain: "Begal", *Selompret Melajoe*, 10/10/1906; "Boei", *Selompret Melajoe*, 3/12/1907; "Ketangkap", *Selompret Malajoe*, 8/9/1910; "Gadoek", *Warna Warta*, 29/9/1916; *Warna Warta*, 23/7/1923. Aksi kriminal dengan kekerasan, tidak sebatas pembegalan, merampas dengan paksa terhadap harta benda milik korban juga menjadi fenomena kehidupan sosial di Semarang.

Ditemukan tiga kasus aksi perampasan, yaitu "Perkara Perampasan di Pasar Damaran", *Soeara Semarang*, 25 Januari 1937; "Perampasan Kadet di Pedamaran". *Poesaka*, 6 Agoestoes 1940; "Penyerobotan Toesoek Konde", *Soeara Semarang*, 5 Nopember 1940.

Dalam konteks kejahatan sejarah kriminalitas dan kekerasan ternyata juga dijumpai pola kriminal berupa kekerasan yang diwujudkan dalam kuasa negara melalui aparat keamanan, yang dialami oleh para pedagang ketika beraktivitas di ruang-ruang publik, seperti di sepanjang Jalan Wot Gandul. Beberapa kasus yang tercatat di surat kabar antara lain: "Politie berlakoe kasar, *Dagblad Asia Semarang*, 8/8/1927; "Kabar Kota: Ganggoe Pengidoepan", *Dagblad Asia Semarang*, 19/8/1927; "Gara2 Abang Politie Banjak Tengkoelak", *Djawa Tengah*, 8/3/1930; "Semarang dan sekiternya: Lagi

sekali tengkoelak dioeber2", *Djawa Tengah*, 11/4/1930; "Perkara Perlawanan di Kaligawe", *Soeara Semarang*, 3/2/1936; "Boentoet Perkara Kaligawe?", *Soeara Semarang*, 13/2/1936; "Kemiskinan Orang Tani didalam kekayaan yang dihasilkannya", *Pasar Saptoe*, 18/4/1936, Th.I, (Madjallah Pendidikan Perekonomian); "Pengrasa'an Tida Poeas di Genoek Antara toekang2 grobag", *Soeara Semarang*, 10/6/1936. Meminjam konsep yang digunakan Wikström bahwak kejahanan jalanan atau kejahanan di depan umum dalam beberapa kasus digunakan dalam arti luas, termasuk kejahanan yang terjadi tidak hanya di jalan, alun-alun, dan taman, tetapi juga di tempat-tempat hiburan umum dan transportasi umum (1995:430).

Di samping aksi yang didominasi oleh tindakan kejahanan terhadap harta benda, aksi kekerasan terjadi karena konflik horisontal dan vertikal, baik sesama pedagang maupun antara pedagang dengan kepala pasar. Berlangsungnya fenomena tersebut, jika dicermati waktu kejadiannya, menunjukkan bahwa konflik sering muncul sebagai akibat modernisasi pasar yang berimplikasi pada merger tujuh pasar lingkungan.

Kasus-kasus yang tercatat di surat kabar lokal sebagai contoh dari adanya konflik tersebut adalah sebagai berikut: "Pasar Djohar Hendak Dibakar", *Soeara Semarang*, 18/3/1938; "De aanslag op den marktmeester Drama op Semarang's Centrale pasar", *De Sumatra Post*, 17/11/1939, Jg: 41; "Berkrai rame", *Djawa Tengah*, 17/4/1930; "Katjilakaan Sedih", *Djawa Tengah*, 19/4/1930; "Gila atawa Laper", *Djawa Tengah*, 16/4/1930; "Pengenaja'an Heibat, Koeli Tionghoa dikrojok 2 koeli Indonesiers", *Soeara Semarang*, 22/1/1936; "Penganajaan di Psr Djohar", *Soeara Semarang*, 16/10/1940; "Penikeman di Pasar Boeroeng", *Sin Min*, 17/1/1938; "Perkelahian Hebat di Pasar Djohar Gara-2 persaingan dagang", *Poesaka*, 24/10/1940.

Heterogenitas etnis yang meruang di kampung-kampung Semarang membawa beragam persoalan yang berdampak terhadap situasi keamanan dan kenyamanan warga kota di tempat-tempat umum. Misalnya kasus perjudian yang dilakukan di pinggir-pinggir

jalan maupun di dalam pasar merupakan persoalan sosial perkotaan yang masih berlangsung detik ini, sekalipun dalam ruang tersembunyi. Berikut ini hasil liputan surat kabar tentang masalah tersebut. "Pasar-pasar Malem bikin malarat pada rajat", *Economy*, 26 Oktober 1929; "Pasarans Kaoem pendjoedi", *Djawa Tengah*, 25 Pebroeari 1930; "Pendjoedian Dalem Pasar Djohar", *Soeara Semarang*, 14 Mei 1937; "Vier gemeente wakers gearresteerd Toko-houders Pasar Djohar bestolen", *Soerabaijasch Handelsblad*, 03 November 1937, Jg: 85; "Ambengan Tida Aman", *Soeara Semarang*, 29 October 1940.

Memang dari catatan surat kabar di atas bahwa aksi kriminal dan kekerasan yang pernah terjadi di Semarang dalam tensi rendah, dengan asumsi sepanjang empat puluh tahun, hanya tercatat enam puluh kasus. Namun satu hal yang pasti bahwa karakteristik masyarakat dalam konteks keterhimpitan secara ekonomi dan sosial, menurut Philip J. Cook dalam *Crime Control in the City* dipandang sebagai akar penyebab dari timbulnya aksi kriminal dengan menggunakan kekerasan (2009: 58). Meskipun tidak ditemukan informasi secara detil mengenai latar belakang pelaku kriminal, sangat masuk akal untuk mempercayai bahwa ketimpangan pendapatan dan pendidikan yang terbatas telah menciptakan lahan subur bagi tumbuhnya kejahatan, baik dengan kekerasan maupun tanpa kekerasan (Cook, 2009: 65).

Sosiolog Weber (1977) yang lekat dengan pemikiran tentang kota adalah tempat pasar dan Lofland melihat kota adalah dunia orang asing (Lofland, 1973), maka penjelasan historis yang bisa dikonstruksi adalah dalam kondisi apapun di kota, orang asing tidak dapat diabaikan atau diterima begitu saja. Hal itu menggambarkan tentang tidak ramahnya ruang kota, tentang kekerasan yang berlangsung di dalamnya, tentang perlunya sikap waspada atas kehidupan di kota. Semakin besar kota, semakin banyak kehidupan sosial yang akan terjadi di arena publik dan melibatkan orang asing. Seiring dengan meningkatnya urbanisasi, maka kegiatan publik semakin membuat masyarakat kota saling berinteraksi dengan orang-orang yang tidak dikenal dan bisa jadi mengancam

(Fischer, 1981: 308). Dalam catatan Wikström, perkotaan cenderung menjadi lingkungan kota utama untuk memahami hubungan antara urbanisasi dan kejahatan (1995: 435-438), yang ditandai oleh integrasi sosial yang rendah, yaitu orang-orang asing satu sama lain, heterogenitas, dan mobilitas tinggi. Dalam kondisi demikian, perkotaan merupakan tempat pertemuan paling sering antara orang-orang biasa dan yang terpinggirkan secara sosial, sehingga menciptakan peluang bagi pelaku kriminalitas.

PENUTUP

Kajian ini menghasilkan sebuah gambaran tentang hubungan negara kolonial dengan penguasa lokal serta perilaku sosial masyarakat perkotaan di Semarang sepanjang empat dekade akhir era kolonial. Kuantitas dan kualitas kriminalitas cenderung fluktuatif. Fluktuasi intensitas kriminal dalam realitas historisnya tamak dalam kondisi sosioekologis di ruang publik kota yang mengalami fase dari kota tradisional ke kota modern.

Keberadaan bangunan penjara yang semakin banyak sejak abad ke-19 hingga abad ke-20, pada satu sisi menggambarkan semakin beragamnya kriminalitas di perkotaan telah menjadi ruang yang memberi harapan hidup bagi orang kebanyakan, namun di sisi lain menunjukkan bahwa negara kolonial ternyata membuktikan ketidakmampuannya dalam mengontrol secara ketat atas beragam problem sosial perkotaan. *Departemen van Justisie* dan akhirnya penjara menjadi jalan keluar bagi negara kolonial untuk menghentikan aksi kriminalitas, sekalipun dari waktu ke waktu realitas keseharian menggambarkan fenomena kejahatan dan kekerasan hadir dengan modus dan model yang berlainan.

Terbentuknya *gemeente* mengawali berfungsinya proses transformasi dari kota tradisional menjadi kota modern sebenarnya dimulai dari perubahan di dalam sistem pemerintahan. Perubahan dalam sistem politik yang ada di Semarang memengaruhi realitas sosial beserta permasalahannya menjadi semakin beragam dan kompleks, sekalipun

tidak dalam tensi tinggi. Ketika bupati, adipati, patih, wedana, lurah hingga kepala kampung masih menguasai kota, maka relasi sosial dan ekonomi berada di tangan pejabat bumiputra.

Namun kemudian ketika penghapusan kabupaten digantikan oleh *gemeente*, maka yang terjadi adalah sistem *direct rule*. Penguasa lokal mulai tereksklusi di dalam ruang kota dan proses marginalisasi otoritas lokal, sekalipun tidak ditemukan data secara detil, tampaknya dapat dihubungkan dengan tidak signifikannya kontrol negara kolonial atas realitas sosial masyarakat di perkotaan. Keberagaman realitas sosial perkotaan yang direpresentasikan dalam wujud kriminalitas dan kekerasan, secara implisit merupakan eksistensi identitas otoritas lokal.

Akan tetapi, satu hal yang dapat dipahami dari realitas historis tentang kekerasan dan kriminalitas yang pernah terjadi di ruang kota Semarang adalah berbagai peristiwa yang terjadi akhir-akhir ini mempunai riwayat masa lalu yang mampu menjaga harmoni dan keamanan, sehingga kriminalitas yang terjadi tidak seekstrim dan sebrutal kejadian yang ada di Solo da Jakarta

UCAPAN TERIMA KASIH

Terselesaikannya tulisan ini, tidak bisa dilepaskan dari kontribusi berbagai pihak. Pertama, penulis menghaturkan terimakasih kepada Prof. Dr. Bambang Purwanto atas berbagai masukan dan saran tentang beragam problem perkotaan. Kedua, tentunya kepada pustakawan di Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, yang dengan terbuka mengizinkan penulis mengakses surat kabar sezaman. Ketiga, kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Badan Pelestarian Nilai Budaya Sulawesi Selatan yang bekerjasama dengan Balitbang Agama Makasar beserta Departemen Ilmu Sejarah FIB Universitas Hasanudin. Melalui seleksi abstrak yang penulis kirim, tulisan ini bisa terwujud, terimakasih atas kesempatan sebagai pemakalah dalam Seminar Internasional “Conflict and Violence: Historical Reconstructions and Cultural Resolutions”.

DAFTAR PUSTAKA

Surat Kabar Sezaman

- “Tjoerian”. *Selompret Melajoe*. 22 Djuni 1907.
“Gemeenteraad di Semarang”. *Selompret Melajoe*. 30 Djanoeari 1906.
“Sarang Kadet”. *Selompret Melajoe*. 7 Maart 1908.
“Soeka Tetapi Tjoema Sebentar”. *Selompret Melajoe*. 3 Desember 1907.
“Kadet”. *Selompret Melajoe*. 18 Agoestoes 1908.
“Pentjoeri”. *Selompret Melajoe*. 18 Agoestoes 1908.
“Makin Gagah Maling dan Kadet”. *Selompret Melajoe*. 12 September 1911.
“Tjerdik”. *Selompret Melajoe*. 26 November 1907.
“Membawa barang dengan grobag”. *Selompret Melajoe*. 26 November 1907.
“Kadet”, *Selompret Melajoe*. 5 Maart 1908.
“Keroegian”. *Selompret Melajoe*. 3 Desember 1907.
“Koetil”. *Selompret Melajoe*. 11 April 1908.
“Haroes Didjaga Benar”, *Selompret Melajoe*. 15 Oktober 1908.
“Kadet”, *Selompret Melajoe*. 29 Djanoeari 1910.
“Begal”, *Selompret Melajoe*. 10 Oktober 1906.
“Tjoerian Kain”, *Selompret Melajoe*. 20 April 1907.
“Kadet”, *Selompret Melajoe*. 17 Oktober 1908.
“Boei”, *Selompret Melajoe*. 3 Desember 1907.
“Ketangkap”, *Selompret Malajoe*. 8 September 1910.
“Diketjoeboeng?”, *Selompret Malajoe*. 10 Nopember 1910.
“Koetil”, *Selompret Melajoe*. 1 September 1911.
“Sial Dangkal”, *Warna Warta*. 27 Juli 1916.
“Gadoek”, *Warna Warta*. 29 September 1916.
Warna Warta. 23 Juli 1923.
“Politie berlakoe kasar, *Dagblad Asia Semarang*. 8 Augustus 1927.
“Kabar Kota: Ganggoe Pengidoepan”, *Dagblad Asia Semarang*. 19 Augustus 1927.
“Gara2 Abang Politie Banjak Tengkoelak”. *Djawa Tengah*. 8 Maart 1930.

- “Semarang dan sekiternya: Lagi sekali tengkoelak dioeber2”. *Djawa Tengah*. 11 April 1930,
- “Pasar- pasar Malem bikin malarat pada rajat”. *Economy*. 26 Oktober 1929,
- “Pasaran Kaoem pendjoedi”. *Djawa Tengah*. 25 Pebroeari 1930.
- “Semarang dan sekiternya: Djadi korban penipoe”, *Djawa Tengah*. 11 April 1930.
- “Maling Oeloeng”, *Djawa Tengah*. 11 April 1930.
- “Gila atawa Laper”, *Djawa Tengah*. 16 April 1930.
- “Berkrai rame”, *Djawa Tengah*. 17 April 1930.
- “Katjilakaan Sedih”, *Djawa Tengah*. 19 April 1930.
- “Pengeniaja'an Heibat, Koeli Tionghoa dikrojok 2 koeli Indonesiers”. *Soeara Semarang*. 22 Djanoeari 1936.
- “Perkara Perlawanann di Kaligawe”, *Soeara Semarang*. 3 Febroeari 1936.
- “Boentoet Perkara Kaligawe?”, *Soeara Semarang*. 13 Febroeari 1936.
- “Kemiskinan Orang Tani didalam kekayaan yang dihasilkannya”, *Pasar Saptoe*. 18 April 1936, Th.I, (Madjallah Pendidikan Perekonomian),
- “Pengrasa'an Tida Poeas di Genoek Antara toekang2 grobag”, *Soeara Semarang*. 10 Djuni 1936.
- “Perkara Perampasan di Pasar Damaran”, *Soeara Semarang*. 25 Januari 1937.
- “Pendjoedian Dalem Pasar Djohar”, *Soeara Semarang*. 14 Mei 1937.
- “Vier gemeente wakers gearresteerd Tokohouders Pasar Djohar bestolen”. *Soerabaijasch Handelsblad*. 03 November 1937, Jg: 85.
- “Pentjoerian di Pasar Djohar Semarang”. *Djawa Tengah*, 3 November 1937.
- “Penikeman di Pasar Boeroeng”. *Sin Min*. 17 Djanoeari 1938.
- “Pasar Djohar Hendak Dibakar”. *Soeara Semarang*. 18 Maart 1938.
- “Perkara Pentjoerian di Pasar Djohar”. *Soeara Semarang*. 2 Djanoeari 1939.
- “Itoe Perkara Pentjoerian di Pasar Djohar”. *Soeara Semarang*. 19 Djanoeari 1939.
- “Pentjoerian di Pasar Djohar”, *Soeara Semarang*. 20 Djanoeari 1939.
- “Perkara Pentjoerian di Pasar Djohar”, *Soeara Semarang*. 14 Febroeari 1939
- “Itoe Pentjoerian di Pasar Djohar”, *Soeara Semarang*. 14 Maart 1939.
- “De aanslag op den marktmeester Drama op Semarang's Centrale pasar”. *De Sumatra Post*. 17 Nopember 1939, Jg: 41.
- “Perampasan Kadet di Pedamaran”. *Poesaka*. 6 Agoestoes 1940.
- “Pentjoerian Dalem Pasar Djohar”. *Soeara Semarang*. 24 September 1940.
- “Penganiajaan di Psr Djohar”. *Soeara Semarang*. 16 Oktober 1940.
- “Perkelahian Hebat di Pasar Djohar Gara-2 persaingan dagang. *Poesaka*. 24 October 1940.
- “Pentjoeri Ketjil Ditangkep”*Soeara Semarang*. 28 October 1940.
- “Ambengan Tida Aman”. *Soeara Semarang*. 29 October 1940.
- “Penyerobotan Toesoek Konde”. *Soeara Semarang*. 5 Nopember 1940.
- “Doea Pentjoerian Dalem Pasar Djohar”. *Soeara Semarang*. 23 Djoeli 1941.
- “Kerusuhan dan Demokrasi”. *Kompas*. 24 Mei 2019.
- “Lima Fakta Pembakaran Mobil di Jateng”. *Kompas*. 1 Februari 2019.

Buku, Jurnal, Disertasi.

- Bastin, John. 1957. The Native Policies of Sir Stamford Raffles in Java and Sumatra, An Economic Interpretation. Oxford: At The Clarendon Press.
- Basundoro, Purnawan. 2012. Pengantar Sejarah Kota. Yogyakarta: Penerbit Ombak.
- Boomgaard, Peter. 2004. Anak Jajahan Belanda: Sejarah Sosial dan Ekonomi Jawa 1795-1880. Jakarta: Djambatan – KITLV.
- Brommer, B., et al. (ed.). 1995. Semarang, Beeld van een Stad. Voorburg: Asia Maior.

- Burger, D.H., & Prajudi. 1962. *Sedjarah Ekonomis Sosiologis Indonesia*. Djakarta: Pradnya Paramita.
- Cobban, James L. 1988. "Kampungs and Conflict in Colonial Semarang", *Journal of Southeast Asian Studies*, Vol.19, №.2, (Sep.).
- Cook, Philip J. 2009. "Crime Control in the City: A Research-Based Briefing on Public and Private Measures". *Cityscape*, US Department of Housing and Urban Development. Lessons for the United States From Asian Nations, Vol. 11, №. 1, pp. 53-79.
- Day, Clive. 1905. *Nederlandsch Beheer over Java Gedurende Drie Eeuwen*. Gravenhage: W.P. Van Stockum & Zoon.
- Dick, H.W. 2002. "Munculnya Ekonomi Nasional 1808-1990-an". dalam J. Thomas Lindblad et.all (ed.). *Fondasi Historis Ekonomi Indonesia*. Yogyakarta: Pusat Studi Sosial Asia Tenggara UGM - Pustaka Pelajar.
- Elson, R.E. 2002. "Dari 'State ke State': Rezim yang Berubah dari Produksi Ekspor Petani pada Pertengahan Abad Ke-19 di Jawa". dalam J. Thomas Lindblad et.all. (ed). *Fondasi Historis Ekonomi Indonesia*. Yogyakarta: Pusat Studi Sosial Asia Tenggara UGM dengan Pustaka Pelajar.
- Evers, Hans-Dieter & Rüdiger Korff. 2002. *Urbanisme di Asia Tenggara: Makna dan Kekuasaan Dalam Ruang-Ruang Sosial*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Fischer, Claude S. 1981. "The Public and Private Worlds of City Life." *American Sociological Review*. Vol. 46. 306-316.
- Giddens, Anthony. 2005. *Konsekuensi Konsekuesi Modernitas*. Yogyakarta: Kreasi Wacana Yogyakarta.
- Gilbert, Alan & Josef Gugler. 1996. *Urbanisasi dan Kemiskinan di Dunia Ketiga*. Yogyakarta: Tiara Wacana Yogyakarta.
- Graaf, Hermanus Johannes de. 1987. *Runtuhnya Istana Mataram*. Cet. I. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti
- Handinoto. 2015. *Perkembangan Kota di Jawa, Abad XVIII Sampai Pertengahan Abad XX Dipandang dari Sudut Bentuk dan Struktur Kotanya*. Yogyakarta: Penerbit Ombak.
- Lofland, Lyn H. 1973. *A World of Strangers: Order and Action in Urban Public Space*. New York: Basic Book.
- Nordholt, Henk Schulte. 2002. *Kriminalitas, Modernitas dan Identitas Dalam Sejarah Indonesia*. Jakarta: Pustaka Pelajar.
- Hunter, A. 1985. "Private, Parochial and Public Orders: The Problem of Crime and Incivility in Urban Communities." dalam Gerald D. Suttles and Mayer N. Zald (ed). *The Challenge of Social Control Institution Building and Systemic Constraint*, Norwood, N.J.: Ablex.
- Kartodirdjo, Sartono. 1984. *Pemberontakan Petani Banten 1888*. Jakarta: Pustaka Jaya
- Kuncoro, Mudrajad. 1995. "Desentralisasi Fiskal di Indonesia: Dilema Otonomi dan Ketergantungan", dalam *Prisma*, №.4, Th. XXIV.
- Manasse Malo dan Peter J.M. Nas. 1991. "Otonomi daerah, Manajemen perkotaan di Indonesia", dalam P.J.M. Nas (ed). 2007. *Kota-Kota Indonesia, Bunga Rampai* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press).
- Nas, Peter J.M. dan Kristen Theuns, 2005. "Semarang, Apakah H.F. Tillema Seorang Sutradara Perubahan Kota?", dalam P.J.M. Nas. 2007. *Kota-Kota Indonesia: Bunga Rampai*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Nas, Peter J.M. dan Welmoet Boender. 2002. "Kota Indonesia dalam teori perkotaan". dalam P.J.M. Nas. 2007. *Kota-Kota Indonesia: Bunga Rampai*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Pratiwo. 2005. "The City Planning of Semarang 1900–1970". Freek Colombijn dkk (ed.). *Kota Lama Kota Baru, Sejarah Kota-kota di Indonesia*. Yogyakarta: Ombak–NIOD.
- Puwanto, Bambang. 2004. "Antara Sentralisasi dan Desentralisasi: Ekonomi dan Otonomi Daerah dalam Realitas Sejarah". dalam *Lembaran Sejarah*. Vol. 7, №.7.

- . 2005. "Kekerasan dan Kriminalitas di Kota Pada Saat Transisi: Kotagede, Yogyakarta Pada Akhir Masa Kolonial dan Awal Kemerdekaan". dalam Freek Colombijn ed.). Kota Lama Kota Baru, Sejarah Kota-Kota di Indonesia. Yogyakarta: Penerbit Ombak – Unair – Usaid.
- . 2006. Gagalnya Historiografi Indonesiasentrisk?! Yogyakarta: Penerbit Ombak.
- . 2008. "Menulis Kehidupan Sehari-hari Jakarta: Memikirkan Kembali Sejarah Sosial Indonesia", dalam Henk Schulte Nordholt, Bambang Purwanto, Ratna Saptari (ed.). Perspektif Baru Penulisan Sejarah Indonesia. KITL-Jakarta: Yayasan Obor Indonesia-Pustaka Larasan.
- & Asvi Warman Adam. 2013. Menggugat Historiografi Indonesia. Yogyakarta: Penerbit Ombak.
- . 2017. "Ruang Maritim di Sisi Barat Pulau Sumatra yang Diabaikan Sebuah Tinjauan Historiografis". Paramita: Historical Studies Journal, 27 (2). 212-228
- Ricklefs, M.C. 1991. Sejarah Indonesia Modern. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- . 2005. Sejarah Indonesia Modern 1200-2004. Jakarta: Serambi Ilmu Semesta
- Staatsblad van Nederlandsch Indië 1903, №.329. Batavia: Landsdrukkerij
- Steedly, Mary Margareth. 1999. "The State of Cultural Theory in the Anthropology of Southeast Asia". Annual Review of Anthropology. Vol.28. pp. 431-454.
- Suara Merdeka, 13/12/1980.
- Suhartono. 1991. Apanage dan Bekel, Perubahan Sosial di Pedesaan Surakarta 1830-1920. Yogyakarta: Tiara Wacana
- Suhartono. 1995. Bandit-Bandit Pedesaan di Jawa: Studi Historis 1850-1942. Yogyakarta: Aditya Media.
- Suroyo, A.M. Djuliati. 2002. "Penanaman Negara di Jawa dan Negara Kolonial". dalam J. Thomas Lindblad et.all. (ed). Fondasi Historis Ekonomi Indonesia. Yogyakarta: Pusat Studi Sosial Asia Tenggara UGM - Pustaka Pelajar.
- Suryo, Djoko. 1989. Sejarah Sosial Pedesaan Karesidenan Semarang 1830-1900. Yogyakarta: PAU Studi Sosial, UGM.
- & Sri Margana (ed.). 2009. Transformasi Masyarakat Indonesia Dalam Historiografi Indonesia Modern. Yogyakarta: Penerbit STPN Press.
- Van Zanden, Jan Luiten & Daan Marks. 2012. Ekonomi Indonesia 1800-2010, Antara Drama dan Keajaiban Pertumbuhan. Jakarta: Penerbit Buku Kompas
- Vickers, Adrian. 2011. Sejarah Indonesia Modern. Yogyakarta: Insan Madani
- Weber, Max. 1977. "Apakah yang disebut Kota?". Sartono Kartodirdjo (ed.). Masyarakat Kuno dan Kelompok-Kelompok Sosial. Jakarta: Bhratara Karya Aksara.
- Wikström. P.H. 1995. "Preventing City – Center Street Crimes". Building a Safer Society: Strategic Approaches to Crime Prevention. Crime and Justice, The University of Chicago Press. Vol. 19, pp. 429-468.
- Wijanarka. 2007. Semarang Tempo Dulu, Teori Desain Kawasan Bersejarah. Yogyakarta: Ombak.
- Wijayati, Putri Agus. 2001. Tanah dan Sistem Perpajakan Masa Kolonial Inggris. Yogyakarta: Tarawang Press
- . 2019. "Sejarah Sosial Pasar Johar Semarang Pada Abad Ke-20". Disertasi Fakultas Ilmu Budaya Universitas Gadjah Mada.
- Wijono, Radjimo Sastro. 2013. Modernitas Dalam Kampung, Pengaruh Kompleks Perumahan Sompok terhadap Pemukiman Rakyat di Semarang Abad ke-20. Jakarta: LIPI Press.
- Wiryomartono, A. Bagoes P. 1995. Seni Bangunan dan Seni Binakota di Indonesia. Jakarta: Gramedia

